



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OVA KURNIAWAN
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PERENCANAAN STRATEGIS TRANSMISI
3. NHK : 467523

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 648 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 447.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, Honda CITY SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, MITSUBSHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.441.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.938.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.938.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.